

Analysis of the Role of Internal Audit Implementation in Improving the Quality of Financial Statements Sumedang Regency Government (Case Studies on Sumedang Regency Government)

Ahmad Andy Adinegara¹, Maman Nurachman²
^{1,2}Univesitas Sebelas April Sumedang
ahmadandy.feb@unsap.ac.id, maman.feb@unsap.ac.id

Article Info

Article history:

Received Mar 19, 2023

Revised Mar 20, 2023

Accepted Mar 26, 2023

Keywords:

Implementation of internal audit
Improving the quality of financial statements

ABSTRACT

This study aims to determine how the implementation of internal audit in improving the quality of financial statements of the Sumedang Regency Government. The object of this study is the Sumedang Regency Inspectorate, the method used in this study is a qualitative descriptive method, which is research that is included in the type of qualitative research. Research is expected to reveal facts, circumstances, phenomena, variables and circumstances that occur when the research runs and present what it is. The results of the research obtained show that the implementation of the Financial Statement Audit by the Inspectorate has been carried out well. The conclusion of this study is the preparation of Financial Statements based on the implementation of Financial Statement audits by the Inspectorate in accordance with applicable provisions and procedures.



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Ahmad Andy Adinegara,
Program Studi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jl. Angkrek Situ No.19, Situ, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Email: ahmadandy.feb@unsap.ac.id

1. INTRODUCTION

Permendagri No 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Permendagri No 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan peraturan yang menuntut keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan penataan sistem pengawasan pengelolaan keuangan daerah dengan menempatkan tanggung jawab utama kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah..

Dalam pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan audit laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, proses audit menjadi sebuah keharusan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan amanah peraturan perundangan dan dalam rangka mewujudkan tata kelola yang lebih baik.

Namun hal ini bertolak belakang dengan keadaan yang ditemukan, Hal ini disebabkan minimnya alokasi dana pengembangan sumber daya manusia yang ada di inspektorat. Keterbatasan ini mengakibatkan penugasan audit

dengan menempatkan auditor yang memiliki kompetensi teknis khususnya akuntansi tidak dapat dipenuhi setiap tahunnya. Kedudukan organisasi yang kurang independen dalam melaksanakan tugas, karena bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan daerah secara keseluruhan, terhadap kepala daerah juga mempengaruhi independensi dalam merumuskan hasil audit.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan audit internal oleh inspektorat.
- b. Bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten sumedang.
- c. Bagaimana peranan audit internal yang dilakukan oleh inspektorat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten sumedang.

2. LITERATUR STUDY

a. Pengertian Internal Audit

Audit internal adalah suatu fungsi independen yang dibentuk dalam suatu organisasi yang mengkaji dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai bentuk jasa yang diberikan bagi organisasi (Sawyer 2012). Dalam tugasnya membantu pimpinan maka fungsi audit internal harus sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen yang dapat digolongkan sebagai berikut: (a) Fungsi perencanaan, yang merupakan perencanaan operasi melalui saluran manajemen yang sah yang meliputi rencana jangka panjang maupun rencana jangka pendek sesuai dengan tujuan organisasi; (b) Fungsi pengawasan termasuk pengembangan testing dan perbaikan kelayakan yang berarti dengan membandingkan standar dengan hasil pekerjaan dan membantu pimpinan dalam menetapkan kesesuaian antara hasil yang nyata dengan standar; (c) Fungsi pelaporan, yaitu meliputi penyajian interpretasi dan analisa data keuangan bagi pimpinan dan menekankan penilaian data dan referensi organisasi serta tujuan dan metode bagian-bagian; (d) Fungsi akuntansi, termasuk pembentukan organisasi dan akuntansi umum, akuntansi biaya dengan sistem dan metode yang mencakup rancangan dan pembentukan serta pemeliharaan semua buku-buku catatan transaksi; (e) Fungsi lain-lain, termasuk pemberi nasihat perpajakan, memperbaiki sistem dan prosedur serta audit internal.

b. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan (Iman Mulyana, 2015). Laporan Keuangan daerah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan (Baridwan. 2015). Menurut PP No 71 Tahun 2010 kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dapat dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: (a) Relevan; (b) Andal; (c) Dapat Dibandingkan; (d) Dapat Dipahami.

3. METHOD (10 pt)

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif adalah merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Nana Syaodih Sukmadinata, 2013).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari Inspektorat Kabupaten Sumedang. Dalam penelitian ini, yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan pihak terkait, khususnya para karyawan Inspektorat Kabupaten Sumedang yang menangani bagian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh selain peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data studi pustaka dan studi daring.

4. RESULTS AND DISCUSSION

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang terhadap laporan keuangan telah dilaksanakan sesuai Permendagri No. 23 Tahun 2007 maka dari itu kualitas laporan keuangan akan meningkat dan pengelolaan keuangan daerah yang baik tercipta. Proses pemeriksaan internal yang dilaksanakan oleh inspektorat telah dilaksanakan antara lain dengan pengumpulan berita atau informasi terkait dengan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang selama Tahun 2017. Kesesuaian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, melakukan observasi dan/atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada, melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji yang material dalam penyusunan laporan keuangan dan melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang arah pelaksanaan audit.

Proses pelaksanaan pemeriksaan Inspektorat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 dilaksanakan pada bulan Juni 2017. Hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Audit yang harus dilaksanakan paling lambat pada Bulan Februari tahun anggaran berikutnya. Tidak ada keterlambatan dikarenakan pelaksanaan audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Audit oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang dilaksanakan setelah Laporan Keuangan selesai disusun oleh BPKAD.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah selesai disusun oleh BPKAD tersebut selanjutnya dilakukan audit oleh Inspektorat. Setelah audit dilaksanakan, maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut disesuaikan oleh BPKAD berdasarkan catatan-catatan pada Laporan hasil audit. Proses selanjutnya adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah dilakukan perbaikan tersebut diserahkan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pemberian Opini atas hasil pemeriksaan oleh BPK.

5. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- A. Mekanisme Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 sudah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Audit yang tertuang dalam Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hal ini sudah adanya perencanaan audit yang memadai, pelaksanaan audit yang sesuai jadwal, metode pelaksanaan audit yang mengacu pada pedoman pelaksanaan audit serta dukungan sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan yang belum memadai pada Inspektorat.
- B. Dalam Proses Pengelolaan Keuangan Daerah, Kabupaten Sumedang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang Setelah di periksa BPK sudah berkualitas Laporan Keuangannya dan juga Pemerintah Kabupaten Sumedang Sudah 2 kali berturut turut mendapatkan penilaian WTP (wajar Tanpa Pengecualian).
- C. Dampak Audit Inspektorat dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 sudah dapat terealisasi. Hal ini dapat diketahui dengan opini hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 sudah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang mungkin dapat berguna sebagai dasar pertimbangan atau masukan bagi pihak lain yaitu sebagai berikut:

- A. Pemerintah Kabupaten Sumedang agar melakukan pendidikan dan pelatihan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan meningkatkan kemampuan pegawai Inspektorat melalui pelatihan-pelatihan dalam melaksanakan audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Agar dapat meningkatkan peran APIP, Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat berkoordinasi dengan Instansi Pembina APIP baik Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- B. Inspektorat agar berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam menentukan analisis data pegawai dan kebutuhan pegawai yang dapat mendukung kinerja Inspektorat. Hasil analisa tersebut dapat disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pertimbangan dalam melakukan usulan mutasi pegawai maupun rekrutment PNS.

- C. Inspektorat agar berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam hal mengidentifikasi jika ada permasalahan yang menjadi penyebab Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang agar memperoleh opini WTP (wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK yang ke 3 kalinya. Koordinasi tersebut dapat pula dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan BPK. Hasil identifikasi permasalahan tersebut menjadi point penting atau prioritas permasalahan yang akan dicari jalan keluar untuk dilakukan perbaikan.

6. REFERENCES

- Agoes, Sukrisno. 2012. Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik). Jakarta: Salemba Empat.
- Angraini, Ayu. 2015. Analisis Kesiapan Inspektorat Kota Surakarta dalam Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akibat adanya perubahan kebijakan SAP berbasis AkruaI. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Arnes. 2014. Kualitas Laporan Keuangan. Jakarta: Salemba Empat
- Bastian, Indra. 2015. Audit Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Indranata, Iskandar. 2016. Terampil dan Sukses melakukan Audit Mutu Internal. Yogyakarta: Kanisius.
- Masmudi. 2013. Laporan Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Muchtar, Ali. 2013. Analisis Fungsi Audit Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mulyana, Iman. 2015. Kualitas Laporan Keuangan Untuk Daerah. Jakarta: Rineka Cipta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Kualitas Laporan Keuangan
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
- Prasetyo, Agus. 2011. Analisis Dampak Audit Inspektorat terhadap kualitas akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Minahasa. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Ritonga. 2010. Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan. Yogyakarta: Kanisius
- Sawyer, Ditternhofer, S.Cheiner. 2012. Internal Auditing, Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sugondo, Mayadiana. 2014. Peran Auditor Inspektorat Jendral Kementerian Pekerjaan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Periode 2009-2013. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Sukmadinata, Nana. 2013. Metode Penelitian. Jakarta: Salemba Empat.
- The Institute Of Internal Auditor. 2014. The Professional Practices Framework. Alta Monte: Florida.
- Tugiman, Hiro. 2016. Standar Profesional Audit Internal. Yogyakarta: Kanisius.
- Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pemberdaharaan Negara
- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Yusuf, Amir. 2013. Auditing Pendekatan Terpadu. Bandung: Alfabeta.

